



Gubernur DIJ Kumpulkan Bupati dan Wali Kota

Rumuskan Langkah Pemberantasan Miras

JOGJA - Gubernur DIJ Ha-mengku Buwono (HB) X mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota di Gedung Gadri, Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, kemarin (28/10). Pertemuan tertutup selama dua jam mulai pukul 13.00 tersebut membahas upaya menekan peredaran minuman keras (miras) di wilayah DIJ.

Pertemuan juga diikuti Sekprov Beny Suharsono, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Setprov DIJ Tri Saktiyana, serta Plt Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad.

Beny menyatakan, rapat diadakan setelah adanya aksi massa dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Jogjakarta di kantor Kepatihan, Jumat (25/10). Ketika itu massa menyampaikan surat permohonan pertemuan dengan HB X. Namun, Beny enggan menyampaikan hasil pertemuan kemarin.

"Belum bisa saya sampaikan detail teknisnya. Beliau (HB X) akan menerima (usulan) dari berbagai macam elemen. Semua akan didengar dan ditindaklanjuti untuk

kebaikan bersama sebelum (akibat miras) terlalu jauh," katanya setelah rapat kemarin.

Plt Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad menambahkan, pihaknya telah gear melakukan razia miras. Namun, kondisi di lapangan, beberapa toko yang sudah ditindak masih berani buka di kemudian hari.

Noviar pun menekankan upaya sosialisasi ke Jaga Warga yang telah terbentuk di seluruh wilayah DIJ. Di-harapkan, warga turut mengamankan wilayah masing-masing dari peredaran miras. "Banyak penjual miras ilegal di DIJ. Mencapai ratusan.

Kalau yang legal, hanya sekitar 21 tempat," ungkapnya.

Santri Menggugat

Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIJ menginstruksikan warga *nahdliyin* mengikuti aksi "Santri Menggugat" di Mapolda DIJ hari ini (29/10) mulai pukul 09.00. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh pengurus, lembaga, badan otonom (banom), serta sivitas akademika di lingkungan PWNU DIJ.

Aksi itu merupakan respons penusukan dua santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, Jogja, oleh orang

mabuk miras di sekitar Prawirotaman pekan lalu. Surat instruksi bernomor 0585/PW/A2/X/2022 tanggal 28 Oktober 2024 tersebut ditandatangani Rais Syuriah KH Mas'us Masduki, Katib Syuriah KH Mukhtar Salim, Ketua Tanfidziyah KH A. Zuhdi Muhdlor, serta Sekretaris Tanfidziyah Muhajir.

Salah satu tuntutan mereka adalah meminta Polda DIJ segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah miras dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Baik bagi para santri maupun masyarakat umum. (**oso/dri**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005